

Judul : DPR Usul Diperpanjang Tanpa Batas Waktu
Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Dana Otsus Aceh Berakhir 2027

DPR Usul Diperpanjang Tanpa Batas Waktu

SENAYAN mendorong agar dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh diperpanjang tanpa batas waktu. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh, sekaligus untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Rencong.

Anggota Badan Legislati (Baleg) DPR Muslim Ayub mengatakan, masa 20 tahun pemberlakuan dana Otsus akan berakhir pada 2027, sehingga perlu segera ada langkah konkret. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat diminta segera membahas revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). "Kami berharap revisi ini menegaskan bahwa dana Otsus Aceh tidak terbatas waktu," ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan, Baleg telah mengidentifikasi sedikitnya delapan pasal dalam UUPA yang perlu dibahas, termasuk pasal-pasal terkait mekanisme dana Otsus. Revisi akan menegaskan pentingnya pengawasan dan efektivitas pemanfaatan dana, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

"Karena itu, kami menginginkan pengawasan yang kuat agar pemanfaatan dana Otsus benar-benar sesuai aturan

keuangan negara," tutur politikus Partai NasDem itu.

Muslim berharap, Pemerintah Pusat mempertimbangkan penambahan alokasi dana Otsus kembali ke angka 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) seperti pada masa awal implementasi. Kondisi fiskal nasional memang menuntut efisiensi, namun kekhususan Aceh harus tetap dihormati. "Yang paling penting, dana Otsus harus diperpanjang tanpa batas waktu, selama Aceh masih berstatus daerah khusus," katanya.

Anggota Baleg DPR Nasir Djamil menambahkan, revisi UUPA harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni kewenangan daerah, kebijakan fiskal, dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tiga hal itu dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Nasir menilai dana Otsus tidak hanya soal bisa mencapai 2,5 persen dari DAU, tapi juga harus bersifat permanen sebagai wujud pengakuan negara terhadap kekhususan Aceh. Selanjutnya, pelaksanaan syariat Islam juga perlu dibiayai APBN sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan negara terhadap



Karena itu, kami menginginkan pengawasan yang kuat agar pemanfaatan dana Otsus benar-benar sesuai aturan keuangan negara.

MUSLIM AYUB

Anggota Badan Legislati DPR

keistimewaan Aceh.

Legislator PKS itu mengusulkan pembentukan lembaga atau kementerian khusus yang menangani pelaksanaan kekhususan

Aceh di tingkat nasional. Selama ini belum ada instansi yang memiliki tanggung jawab tegas terkait hal tersebut. "Mungkin nanti perlu ada kementerian atau lembaga di bawah presiden yang memastikan pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh berjalan dengan baik," katanya.

Terkait Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, Nasir menyebut, dokumen perdamaian itu tetap menjadi inspirasi dan dasar historis lahirnya UUPA. Sebagian besar butir MoU telah diakomodasi, namun masih perlu dievaluasi poin-poin yang belum sepenuhnya terserap.

"MoU Helsinki sudah dicantumkan dalam penjelasan sebagai bentuk pengakuan bahwa perjanjian itu menjadi tonggak lahirnya perdamaian dan dasar terbentuknya UU Pemerintahan Aceh," ucapnya.

Ketua Baleg Bob Hasan memastikan revisi UUPA segera dibahas. Karena, revisi ini bukan hanya untuk memperpanjang masa berlaku dana Otsus, tapi juga menyempurnakan pelaksanaan kekhususan Aceh. "Sekarang kita bergerak menyempurnakannya, karena perjanjiannya sudah mendekati 20 tahun. Maka, kami sudah mulai mempersiapkan

revisinya," terang Bob.

Baleg juga akan membahas soal kewenangan daerah, keadilan ekonomi, dan pembagian sumber daya alam, termasuk batas wilayah laut. Demokrasi ekonomi harus menjadi dasar pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. "Setiap UU pasti punya kekurangan dalam pelaksanaannya. Tapi intinya adalah bagaimana menuju kesejahteraan yang adil bagi masyarakat Aceh," lanjutnya.

Bob menegaskan, Aceh memiliki kekhususan yang perlu diperjuangkan dalam konteks regulasi. Karena itu, perpanjangan dana Otsus Aceh adalah keniscayaan, namun formulasi baru diperlukan agar penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Baleg DPR, lanjutnya, menargetkan revisi UUPA bisa segera rampung tahun ini. Saat ini, Baleg tengah menyerap aspirasi masyarakat Aceh dari berbagai kalangan untuk memastikan revisi UU tersebut benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

"Kita sedang dalam masa reses, tapi tetap turun ke Aceh untuk mendengarkan aspirasi. Tujuannya agar revisi ini bisa dipercepat dan diselesaikan tahun ini," pungkasnya. ■ PVB